

Nama:

No :

Kelas:

Hierarki Peraturan Perundang-undangan



01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	

Perda Kabupaten/Kota

Ketetapan MPR (Tap MPR)

Peraturan Pemerintah (PP)

UUD NRI Tahun 1945

Peraturan Presiden (Perpres)

Perda Provinsi

UU/ Perppu

Berikan centang pada pernyataan yang tepat

	Benar	Salah
Jika terjadi pertentangan antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah, maka yang berlaku adalah undang-undang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Setelah reformasi, isi dari UUD NRI Tahun 1945 mengalami 5 kali perubahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistematika isi dari UUD NRI Tahun 1945 saat ini adalah: pembukaan, Pasal-pasal, penjelasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bupati atau walikota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota menetapkan peraturan daerah kabupaten/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peraturan larangan merokok yang ada di Provinsi DIY termasuk peraturan daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peraturan Daerah dapat berbeda dengan undang-undang, karena posisinya lebih tinggi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menempati urutan paling akhir dalam hierarki peraturan perundang-undangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UUD NRI Tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh BPUPKI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden/ Pemerintah/Menteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>